

Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cambajawaya

Nasir

Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Email Correspondence : nasir@unm.ac.id

Article History

Received : 02/08/2025

Revised : 21/08/2025

Accepted : 22/08/2025

Published : 30/08/2025

Kata Kunci :

Kepemimpinan; Kepala Desa;
Pemberdayaan Masyarakat;
Partisipasi; Pemerintahan
Desa.

Keywords :

Leadership; Village Head;
Community Empowerment;
Participation; Village
Government.

Abstrak

Kepemimpinan kepala desa memegang peranan strategis dalam keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran kepala desa sebagai penggerak partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk penguatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Cambajawaya, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan peran kepemimpinan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan, namun masih ditemukan berbagai tantangan, seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan lemahnya tindak lanjut program. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas kepemimpinan kepala desa sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan berkelanjutan agar program-program pemberdayaan benar-benar mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa.

Abstract

Village head leadership plays a strategic role in the successful implementation of community empowerment programs at the village level. This study is motivated by the importance of the village head as a driver of community participation, particularly in managing Village Funds aimed at strengthening the village's economic and social sectors. The purpose of this research is to deeply analyze the role of village head leadership in enhancing community empowerment in Cambajawaya Village, Galesong Selatan District, Takalar Regency. A qualitative approach with a descriptive method was employed. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the village head has fulfilled leadership roles in the planning, implementation, and evaluation of empowerment programs. However, challenges remain, such as low community participation and weak follow-up actions. The study concludes that the

effectiveness of the village head's leadership significantly determines the success of community empowerment, requiring more participatory, communicative, and sustainable approaches to ensure that empowerment programs genuinely enhance the capacity and self-reliance of the village community.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) license

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, karena berfokus pada upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga desa dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Dalam konteks pelaksanaan otonomi desa yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan luas untuk mengelola sumber daya dan menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Dalam hal ini, kepala desa memegang posisi strategis sebagai pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Kepala desa dituntut mampu mengelola potensi desa secara optimal, membangun komunikasi yang efektif, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, pemimpin desa juga berperan dalam memastikan agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan kepala desa sangat memengaruhi pencapaian tujuan pemberdayaan, baik dalam bentuk peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, maupun kualitas hidup secara umum.

Desa Cambajawaya, yang terletak di Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, merupakan salah satu desa yang tengah berupaya meningkatkan kualitas pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil observasi awal serta wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat dan aparat desa, terungkap bahwa pelaksanaan program pemberdayaan di desa ini belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang muncul di lapangan antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi warga dalam musyawarah desa, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam mendukung program pemberdayaan, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan elemen masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan yang dirancang dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, muncul pertanyaan kritis mengenai sejauh mana efektivitas kepemimpinan kepala desa mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Secara teoretis, kajian tentang kepemimpinan dalam pembangunan desa dapat dirujuk pada teori kepemimpinan transformasional (Saad Alessa, 2021), yang menekankan pentingnya seorang pemimpin dalam menginspirasi, memotivasi, dan membimbing bawahannya untuk mencapai tujuan kolektif yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada tugas administratif, tetapi juga mampu membawa perubahan positif dalam struktur sosial dan budaya masyarakat desa. Selain itu, teori kepemimpinan partisipatif Wang (2021) juga relevan, karena keberhasilan pembangunan desa sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan, teori empowerment dari Llorente-Alonso, García-Ael, & Topa (2024) menyatakan bahwa masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang memiliki kontrol terhadap kehidupan mereka, yang dicapai melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Damarjati (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa yang komunikatif dan partisipatif berkontribusi besar terhadap keberhasilan program pemberdayaan. Sementara itu, Kapita, Kaawoan, & Lengkong (2020) dalam

studi di Kabupaten Halmahera Timur menemukan bahwa lemahnya kapasitas kepemimpinan kepala desa menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi program pemberdayaan.

Namun, kedua penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek umum kepemimpinan tanpa menyoroti secara mendalam bagaimana konteks sosial-budaya lokal memengaruhi efektivitas peran kepala desa. Penelitian Damarjati (2023) menitikberatkan pada pendekatan komunikasi dan partisipasi, sementara penelitian Kapita, Kaawoan, & Lengkong (2020) fokus pada hambatan struktural dalam kapasitas kepemimpinan. Keduanya belum mengkaji dinamika kepemimpinan dalam ruang sosial masyarakat yang memiliki kearifan lokal, pola gotong royong, dan karakteristik partisipasi yang khas, seperti yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian difokuskan pada Desa Cambajawaya di Kabupaten Takalar yang memiliki ciri khas sosial dan budaya Bugis-Makassar, di mana nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* berpengaruh terhadap pola interaksi antara kepala desa dan masyarakat. Kedua, penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana kepemimpinan kepala desa mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemberdayaan yang dirancang dengan realitas implementasi di lapangan. Ketiga, penelitian ini tidak hanya menilai kepemimpinan dalam perspektif administratif, tetapi juga dalam konteks relasional bagaimana kepala desa membangun kepercayaan, komunikasi, dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai peran kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menyajikan data empiris dari konteks lokal yang masih minim dijadikan objek kajian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Cambajawaya, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepemimpinan lokal serta menjadi bahan rujukan bagi peningkatan kualitas tata kelola desa yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan merupakan proses sosial yang melibatkan upaya memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan perilaku individu atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bertassini, Ometto, Severengiz, & Gerolamo, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, kepemimpinan menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, stabilitas sosial, serta efektivitas tata kelola desa. Kepala desa berperan ganda sebagai pemimpin politik dan administrator publik yang bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat desa melalui proses demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Efektivitas kepemimpinan kepala desa sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah kepemimpinan transformasional. Menurut Saad Alessa (2021), pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya melalui visi yang kuat, kepedulian terhadap kebutuhan individu, serta dorongan untuk melakukan perubahan positif dalam organisasi atau masyarakat. Kepala desa dengan gaya kepemimpinan transformasional dapat menjadi katalisator perubahan, mendorong inovasi lokal, dan memperkuat semangat kolektif masyarakat dalam membangun desanya.

Selain itu, kepemimpinan partisipatif menjadi sangat penting dalam konteks pemerintahan desa yang idealnya berbasis pada nilai-nilai demokrasi lokal dan musyawarah. Northouse & Lee (2025) menekankan bahwa kepemimpinan partisipatif menciptakan ruang bagi keterlibatan anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan, yang tidak hanya meningkatkan rasa memiliki

terhadap keputusan tersebut, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Dalam praktiknya, kepala desa yang partisipatif akan mendorong masyarakat untuk aktif dalam forum musyawarah desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hingga pelaksanaan program-program pemberdayaan.

Lebih lanjut, kepemimpinan kepala desa juga harus mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya lokal, norma adat, serta struktur sosial yang berkembang dalam komunitas desa. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menjembatani antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi pembangunan. Mereka harus membangun komunikasi yang efektif, menjadi fasilitator dalam menyatukan berbagai kepentingan masyarakat, dan mampu memobilisasi sumber daya lokal baik sumber daya manusia, alam, maupun sosial untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif.

Ciri-ciri kepemimpinan kepala desa yang baik antara lain meliputi: kemampuan dalam menyusun visi pembangunan yang realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat, integritas dalam mengelola keuangan desa, responsif terhadap dinamika sosial, serta keterampilan dalam menyelesaikan konflik internal maupun eksternal desa. Pemimpin desa yang demikian akan lebih mudah menumbuhkan kepercayaan publik, memperkuat transparansi, dan mendorong akuntabilitas publik, yang semuanya merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Dengan demikian, peran dan gaya kepemimpinan kepala desa sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan. Pemimpin desa ideal bukan hanya seorang administrator, tetapi juga seorang motivator, mediator, inovator, dan agen perubahan yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kearifan lokal.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep sentral dalam pembangunan berbasis komunitas yang menekankan pada penguatan kapasitas, peran aktif, dan kemandirian masyarakat dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Menurut (Endah, 2020; La Patilaya et al., 2022; Maryani & Nainggolan, 2020; E. Suharto, 2009) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang memberikan kekuasaan, wewenang, dan kemampuan kepada masyarakat untuk mengelola dan mengontrol pembangunan di lingkungan mereka sendiri. Dalam konteks pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan warga desa menjadi subjek aktif dalam proses pembangunan.

Dalam konteks otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan dimaknai sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa agar mampu mengelola potensi sumber daya secara mandiri. Hal ini mencakup pemberian akses terhadap informasi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Llorente-Alonso et al. (2024) mengembangkan konsep *empowerment* ke dalam tiga dimensi, yakni dimensi psikologis (kepercayaan diri, rasa berdaya, dan kontrol pribadi terhadap lingkungan), dimensi organisasi (keterlibatan dalam kelompok atau organisasi masyarakat), dan dimensi komunitas (kemampuan individu dan kelompok untuk memengaruhi sistem sosial secara kolektif). Implementasi pemberdayaan masyarakat desa dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, pembentukan kelompok usaha masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan Karang Taruna. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan pengawasan pengelolaan Dana Desa menjadi bagian penting dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proses pembangunan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021) menekankan bahwa Dana Desa merupakan instrumen utama dalam mendukung program-program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Namun, dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat desa sering kali menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi dan kapasitas masyarakat, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, lemahnya pendampingan

berkelanjutan, serta dominasi kelompok elite lokal yang menguasai proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menyebabkan pemberdayaan yang terjadi lebih bersifat semu atau top-down, tanpa benar-benar membangun kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas aktor lokal, terutama kepala desa dan aparat pemerintah desa, dalam membangun struktur dan budaya partisipatif. Pendekatan pemberdayaan yang berhasil bukan hanya tentang transfer sumber daya, tetapi lebih pada proses pendampingan, pendidikan, dan pembentukan kesadaran kritis masyarakat agar mampu menentukan nasibnya sendiri secara kolektif dan berkelanjutan.

Hubungan Kepemimpinan Kepala Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepemimpinan kepala desa memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengarah, penggerak, dan motivator masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam berbagai program pembangunan. Pemimpin yang memiliki orientasi pada pemberdayaan akan mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program desa, serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Saad Alessa (2021) yang menekankan bahwa pemimpin transformasional mampu menciptakan perubahan positif melalui pengaruh ideal, motivasi inspiratif, dan perhatian individual terhadap kebutuhan anggota masyarakat.

Dalam praktiknya, kepemimpinan kepala desa yang komunikatif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal akan menciptakan iklim sosial yang kondusif untuk pemberdayaan. Penelitian oleh Damarjati (2023) di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap dialog dan melibatkan warga dalam perencanaan serta pelaksanaan program desa dapat memperkuat keberhasilan pemberdayaan. Sebaliknya, penelitian oleh Kapita et al. (2020) di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas kepemimpinan kepala desa, terutama dalam aspek komunikasi dan manajemen konflik, menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, kepemimpinan kepala desa yang efektif tidak hanya menyentuh dimensi administratif semata, melainkan juga mempengaruhi aspek sosial, psikologis, dan kultural masyarakat desa. Misalnya, pemimpin yang memahami karakter masyarakat lokal, nilai-nilai budaya, dan struktur sosial yang ada akan lebih mudah membangun hubungan emosional dan sosial yang kuat dengan warganya. Pendekatan ini memungkinkan kepala desa untuk memobilisasi potensi komunitas, memperkuat solidaritas sosial, dan mengembangkan semangat kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang menyediakan akses terhadap sumber daya, tetapi juga proses membangun kapasitas warga agar mampu mengelola dan mengontrol pembangunan di lingkungannya sendiri (Llorente-Alonso et al., 2024).

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai peran dan gaya kepemimpinan kepala desa menjadi sangat penting untuk dianalisis. Kepemimpinan yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat harus mampu mengintegrasikan antara pengelolaan birokrasi, kemampuan interpersonal, sensitivitas sosial, dan visi pembangunan jangka panjang yang berpihak pada masyarakat. Dengan demikian, kepala desa bukan hanya simbol pemerintahan di tingkat lokal, tetapi juga agen perubahan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk mengangkat kapasitas dan martabat masyarakat desa secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik terhadap dinamika sosial, perilaku kepemimpinan, serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam konteks pembangunan lokal. Penelitian dilaksanakan di Desa Cambajawaya, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar selama periode April hingga Juni 2025. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa desa tersebut sedang aktif melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Sasaran dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai sejauh mana kepala desa berperan sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan potensi masyarakat dalam pembangunan desa. Subjek penelitian terdiri atas beberapa kategori informan, yaitu Kepala Desa Cambajawaya sebagai tokoh utama yang memimpin pemerintahan desa; perangkat desa yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan; serta tokoh masyarakat dan warga desa sebagai penerima manfaat program yang memiliki pengalaman dan persepsi langsung terhadap proses pemberdayaan. Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan pemberdayaan, serta kemampuan mereka dalam memberikan informasi yang relevan dan mendalam terhadap fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menjaga arah diskusi namun tetap memberi ruang pada eksplorasi informasi yang lebih luas. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati langsung perilaku, interaksi, dan proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder seperti dokumen perencanaan desa, laporan kegiatan, notulen rapat, dan peraturan desa yang berkaitan dengan program pemberdayaan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif, namun dibantu dengan pedoman observasi dan pedoman wawancara sebagai alat bantu teknis untuk menjaga konsistensi dan kedalaman informasi.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap persiapan dan studi pendahuluan, pengumpulan data lapangan, verifikasi data, hingga tahap analisis dan penulisan laporan hasil penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber dan melalui teknik yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2019), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan matriks tematik, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretatif berdasarkan pola-pola temuan yang muncul. Seluruh proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian, guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Cambajawaya, ditemukan bahwa kepemimpinan kepala desa berperan dalam beberapa aspek penting pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) perencanaan program, (2) pelibatan masyarakat, (3) pelaksanaan kegiatan, dan (4) evaluasi serta tindak lanjut.

Perencanaan Program Pemberdayaan

Proses perencanaan program pemberdayaan di Desa Cambajawaya secara umum mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam regulasi desa, yaitu melalui forum Musyawarah Desa (Musdes).

Forum ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menetapkan prioritas pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun anggaran, khususnya yang bersumber dari Dana Desa. Musdes di Desa Cambajawaya dipimpin langsung oleh Kepala Desa dengan melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok-kelompok warga.

Secara administratif, keterlibatan masyarakat terlihat dalam daftar hadir maupun notulen musyawarah. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, partisipasi yang terjadi lebih bersifat formalitas atau simbolik daripada substantif. Beberapa warga mengaku hadir karena diundang, tetapi tidak benar-benar memahami substansi pembahasan, bahkan sebagian baru mengetahui program setelah kegiatan pembangunan berjalan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti minimnya sosialisasi sebelum Musdes dilaksanakan, rendahnya literasi masyarakat terkait konsep pembangunan desa, serta pola komunikasi yang cenderung satu arah dari pemerintah desa kepada masyarakat.

Observasi terhadap dokumen Musdes menunjukkan bahwa daftar usulan program lebih banyak berasal dari perangkat desa dan tokoh tertentu. Aspirasi masyarakat umum relatif belum banyak terekam secara tertulis. Kondisi ini menandakan adanya dominasi kelompok elit dalam proses perencanaan, sementara suara kelompok akar rumput belum sepenuhnya terakomodasi. Dengan demikian, meskipun Kepala Desa berupaya membuka ruang partisipasi, forum Musdes belum berhasil membangun diskusi yang inklusif dan kritis sebagaimana prinsip *bottom-up planning* yang menjadi dasar pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, representasi masyarakat dalam forum Musdes juga masih terbatas. Keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya relatif rendah. Dalam beberapa kasus, pemilihan perwakilan masyarakat dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang jelas, sehingga representasi yang hadir belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh elemen desa. Akibatnya, program yang direncanakan lebih banyak mencerminkan perspektif kelompok tertentu dibanding kepentingan kolektif masyarakat.

Secara kepemimpinan, Kepala Desa Cambajawaya telah menjalankan peran formalnya dalam memimpin jalannya perencanaan. Namun, efektivitas kepemimpinan tersebut masih terbatas karena belum mampu membangun mekanisme komunikasi dua arah, transparansi informasi, serta pendekatan edukatif yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan memberikan masukan terhadap program pembangunan. Rendahnya pemahaman warga, dominasi elit, dan lemahnya representasi menjadi indikator bahwa proses perencanaan program pemberdayaan di Desa Cambajawaya masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek perencanaan perlu ditingkatkan tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga substantif. Perlu adanya strategi yang lebih efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat, seperti: penyelenggaraan pra-musyawarah untuk sosialisasi rencana pembangunan, peningkatan literasi warga terkait regulasi desa, dan penerapan mekanisme seleksi representatif agar semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan setara dalam menyuarakan aspirasi. Upaya-upaya tersebut menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menguatkan posisi kepemimpinan kepala desa sebagai fasilitator utama dalam pembangunan berbasis pemberdayaan.

Pelibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Dalam tahap pelaksanaan program pemberdayaan, Kepala Desa Cambajawaya berupaya melibatkan masyarakat melalui berbagai pendekatan strategis. Salah satu bentuk konkret adalah pembentukan kelompok kerja berbasis kegiatan, seperti kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT), kelompok usaha bersama (KUBE), serta tim pelaksana kegiatan (TPK) desa. Selain itu, pemerintah desa juga menyelenggarakan pelatihan berbasis keterampilan, di antaranya pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga, pelatihan menjahit, serta pelatihan keterampilan produksi olahan makanan lokal. Inisiatif tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya untuk membangun kapasitas masyarakat, mengurangi ketergantungan ekonomi, dan mendorong tumbuhnya kemandirian serta kreativitas warga dalam menciptakan peluang usaha.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelibatan masyarakat dalam program-program tersebut belum merata. Tingkat partisipasi masih didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, serta individu yang secara sosial lebih aktif di lingkungan desa. Sebaliknya, kelompok marjinal seperti perempuan dari keluarga kurang mampu, pemuda pengangguran, dan warga lanjut usia relatif kurang terlibat. Minimnya keterlibatan kelompok ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat kepercayaan diri, serta masih adanya anggapan bahwa forum-forum resmi desa hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu.

Selain itu, pola komunikasi top-down yang masih kuat dalam struktur pemerintahan desa menjadi salah satu faktor penghambat terciptanya partisipasi yang setara. Banyak warga menilai bahwa kegiatan sudah dirancang oleh aparat desa, sementara mereka hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat bersikap pasif dan tidak merasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan. Dengan kata lain, pelaksanaan program belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusivitas dan keberagaman sosial yang ada di masyarakat desa.

Dalam praktiknya, kegiatan pemberdayaan juga cenderung bersifat formal dan sesaat, kurang disertai dengan proses pendampingan yang berkesinambungan. Akibatnya, program tidak sepenuhnya memberikan efek jangka panjang dalam membangun kapasitas sosial masyarakat. Misalnya, pelatihan yang diberikan belum diikuti dengan pembinaan lanjutan atau dukungan modal yang memadai, sehingga keterampilan yang diperoleh masyarakat tidak selalu berkembang menjadi kegiatan produktif yang berkelanjutan.

Dari perspektif kepemimpinan, Kepala Desa Cambajawaya memang telah menunjukkan inisiatif dalam membuka ruang partisipasi. Akan tetapi, efektivitasnya masih terbatas karena pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada aspek administratif dan teknis, belum menyentuh aspek kultural dan psikologis masyarakat. Dengan kondisi tersebut, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan peninjauan ulang dengan memperhatikan hambatan struktural (akses informasi, mekanisme koordinasi) dan hambatan kultural (rasa enggan berpendapat, dominasi elit lokal, rendahnya rasa percaya diri).

Agar pemberdayaan benar-benar menjadi proses milik bersama (*shared process*), maka strategi pelibatan masyarakat ke depan perlu diarahkan pada:

1. Penguatan inklusivitas dengan memastikan keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin.
2. Peningkatan komunikasi dua arah melalui forum terbuka yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
3. Pendampingan berkelanjutan agar hasil pelatihan atau program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi kegiatan produktif jangka panjang.
4. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan, sehingga masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap program yang dijalankan.

Dengan demikian, meskipun Kepala Desa Cambajawaya telah melaksanakan fungsinya dalam menggerakkan masyarakat, kualitas pelibatan yang ada masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar bermakna (*meaningful participation*) dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bersama.

Kepemimpinan dalam Mengelola Dana dan Sumber Daya

Dalam konteks pengelolaan dana dan sumber daya desa, Kepala Desa Cambajawaya menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan telaah dokumentasi, informasi mengenai perencanaan maupun realisasi anggaran desa, khususnya Dana Desa, secara rutin dipublikasikan melalui papan informasi desa, baliho di titik strategis, dan laporan tahunan. Langkah ini mencerminkan upaya kepala desa untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi publik terkait alokasi anggaran dan arah penggunaan dana desa.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan masih cenderung bersifat prosedural, belum sepenuhnya substansial. Beberapa masyarakat mengaku

mengetahui bahwa anggaran telah digunakan, namun tidak sepenuhnya memahami rincian alokasi maupun manfaat jangka panjang dari program yang didanai. Seorang tokoh masyarakat bahkan menyatakan, *“Memang kami tahu dana itu dipakai, tapi kadang tidak tahu persis untuk apa saja, apalagi kalau hasilnya tidak langsung terasa.”* Ungkapan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara publikasi informasi dengan pemahaman masyarakat tentang esensi penggunaan anggaran desa.

Salah satu isu utama yang muncul adalah efektivitas alokasi dana pada program pemberdayaan non-fisik, seperti pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan kapasitas. Meskipun program ini dirancang untuk memperkuat sumber daya manusia, sebagian masyarakat merasa dampaknya tidak signifikan jika tidak diikuti dengan tindak lanjut berupa pendampingan, akses permodalan, atau peluang usaha yang nyata. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa penggunaan dana lebih diarahkan pada kegiatan seremonial ketimbang hasil konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dari sisi mekanisme perencanaan, pelibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih terbatas. Forum musyawarah desa memang tetap diselenggarakan, tetapi partisipasi aktif masyarakat umum masih rendah. Proses pengambilan keputusan lebih banyak didominasi oleh aparatur desa dan kelompok elit tertentu, sehingga warga cenderung menjadi penerima informasi pasif daripada aktor aktif dalam menentukan arah pembangunan desa. Kondisi ini membuat transparansi terlihat sekadar formalitas untuk memenuhi tuntutan regulasi, belum sepenuhnya sebagai sarana membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Di sisi lain, dalam pengelolaan sumber daya non-keuangan, kepala desa dinilai cukup responsif terhadap potensi lokal. Upaya pengembangan dilakukan melalui pemanfaatan lahan untuk pertanian kelompok, pembentukan unit usaha melalui BUMDes, serta inisiatif untuk menggerakkan kelompok usaha mikro. Namun, sebagian besar program ini masih bersifat jangka panjang, dengan hasil yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Minimnya sistem monitoring dan evaluasi membuat keberlanjutan serta capaian program sulit diukur secara akurat.

Dengan demikian, meskipun Kepala Desa Cambajawaya telah menunjukkan langkah positif dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperkuat. Pertama, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar penggunaan dana benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. Kedua, efektivitas penggunaan anggaran harus diperhatikan dengan mengarahkan sebagian dana pada program yang berdampak langsung, sembari tetap mendukung program jangka panjang. Ketiga, strategi komunikasi publik perlu diperkuat agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan capaian program, sehingga tercipta kepercayaan dan legitimasi sosial terhadap kepemimpinan kepala desa.

Secara keseluruhan, kepemimpinan kepala desa dalam mengelola dana dan sumber daya di Desa Cambajawaya telah menunjukkan komitmen dasar yang sesuai regulasi, namun masih membutuhkan inovasi dalam membangun partisipasi bermakna, memperkuat dampak nyata program, serta menumbuhkan akuntabilitas yang lebih substansial, bukan sekadar administratif.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi terhadap program pemberdayaan di Desa Cambajawaya dilaksanakan secara periodik, umumnya pada akhir tahun anggaran melalui rapat internal pemerintah desa dan forum Musyawarah Desa. Evaluasi ini meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta penyampaian masukan dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, maupun perwakilan kelompok penerima manfaat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Kepala Desa Cambajawaya menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik serta saran dari berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diupayakan dalam mekanisme evaluasi program pemberdayaan.

Namun demikian, hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan maupun strategi pemberdayaan pada tahun berikutnya. Evaluasi yang dilakukan lebih menekankan pada aspek pelaporan administratif dan dokumentasi kegiatan, sementara dimensi reflektif yakni menganalisis keberhasilan, kegagalan, serta peluang perbaikan yang belum optimal. Misalnya, program pelatihan keterampilan menjahit maupun pengelolaan

usaha kecil berhenti pada tahap pelaksanaan tanpa ada mekanisme tindak lanjut berupa pendampingan, pemberian akses permodalan, atau fasilitasi pemasaran. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Salah satu informan dari kelompok perempuan penerima pelatihan menyatakan bahwa setelah kegiatan berakhir, mereka tidak lagi mendapatkan bimbingan maupun dukungan lanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek keberlanjutan (*sustainability*) program belum menjadi perhatian utama dalam proses evaluasi. Padahal, dalam teori pemberdayaan masyarakat, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari *output* (jumlah kegiatan atau peserta), tetapi dari *outcome* (perubahan kapasitas, peningkatan pendapatan, maupun kemandirian ekonomi).

Selain itu, ketiadaan sistem pelaporan yang terstruktur dari kelompok sasaran menambah kesulitan bagi kepala desa dalam memantau perkembangan pasca-program. Tanpa adanya mekanisme *feedback loop*, proses evaluasi tidak berfungsi sebagai instrumen pembelajaran organisasi (*organizational learning*), melainkan sebatas kewajiban administratif. Dengan demikian, peran kepala desa dalam evaluasi masih terbatas pada pengawasan formal, belum berkembang menjadi fasilitasi reflektif yang mendorong inovasi program.

Dari perspektif kepemimpinan, kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa telah memiliki komitmen pada keterbukaan, tetapi belum maksimal dalam mengartikulasikan hasil evaluasi menjadi strategi tindak lanjut yang konkret. Padahal, peran strategis kepala desa seharusnya tidak hanya memastikan transparansi anggaran, tetapi juga merancang sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (*result-based monitoring*) yang menekankan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.

Agar evaluasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen penguatan pemberdayaan, beberapa langkah perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Membangun sistem monitoring partisipatif, dengan melibatkan kelompok penerima manfaat dalam proses evaluasi untuk memastikan suara masyarakat terwakili.
2. Menerapkan indikator keberhasilan berbasis hasil (*outcome-based indicators*), tidak hanya berfokus pada jumlah kegiatan, tetapi pada dampak nyata seperti peningkatan pendapatan, keterampilan, atau kapasitas organisasi masyarakat.
3. Menyediakan mekanisme tindak lanjut yang jelas, berupa program pendampingan, akses modal, maupun dukungan pemasaran agar hasil pelatihan tidak berhenti pada tataran pengetahuan semata.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam aspek manajemen evaluasi dan pelaporan berbasis data, sehingga kebijakan di tahun berikutnya dapat dirumuskan lebih responsif.

Dengan penguatan tersebut, proses evaluasi tidak hanya menjadi sarana pelaporan formal, tetapi juga instrumen pembelajaran kolektif yang mampu memastikan keberlanjutan program, meningkatkan kualitas kebijakan, serta memperkuat peran kepala desa sebagai fasilitator pemberdayaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran kepala desa dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Cambajawaya mencerminkan unsur-unsur penting dari kepemimpinan transformasional dan partisipatif. Kepala desa telah menginisiasi berbagai langkah seperti penyelenggaraan pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok usaha masyarakat, serta mendorong keikutsertaan warga dalam musyawarah desa. Namun, efektivitas dari pendekatan kepemimpinan ini masih terbatas, terutama dalam mendorong keterlibatan aktif dan meningkatkan keberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam kerangka teori kepemimpinan transformasional sebagaimana dikemukakan oleh Saad Alessa (2021), seorang pemimpin seharusnya mampu menginspirasi, memberikan pengaruh positif, serta memotivasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan kolektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepala desa sudah berusaha menjalankan peran tersebut, tetapi hasil yang dicapai belum sepenuhnya memuaskan. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, minimnya pemahaman terhadap manfaat kegiatan pemberdayaan, serta

lemahnya inisiatif warga untuk menindaklanjuti program yang sudah dilaksanakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara idealisme teori kepemimpinan transformasional dan praktik nyata yang terjadi di tingkat desa.

Lebih lanjut, apabila dianalisis menggunakan perspektif teori partisipasi, keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, merasa memiliki program, serta memiliki kapasitas untuk berperan aktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi antara kepala desa dan masyarakat masih cenderung satu arah, bersifat instruktif, dan kurang dialogis. Akibatnya, banyak warga tidak cukup memahami arah kebijakan pembangunan desa dan tujuan dari program pemberdayaan. Partisipasi masyarakat pun hanya bersifat formalitas, misalnya hadir dalam musyawarah desa tanpa memberikan kontribusi substansial. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Handayani, 2022; Kapita et al., 2020; S. Suharto, 2023; Zsazsa, 2022) yang menegaskan bahwa lemahnya komunikasi partisipatif menjadi hambatan utama dalam pembangunan berbasis pemberdayaan.

Dari sisi transparansi, kepala desa telah berupaya menjalankan prinsip keterbukaan, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa. Informasi pembangunan disampaikan melalui papan pengumuman dan forum musyawarah terbuka. Akan tetapi, sebagaimana ditegaskan oleh Llorente-Alonso et al. (2024), pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada keterbukaan informasi semata. Lebih penting lagi adalah adanya proses pembelajaran kolektif dan penguatan kapasitas agar masyarakat memiliki kontrol nyata terhadap keputusan pembangunan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Tanpa adanya pemahaman kritis, keterbukaan informasi justru berpotensi menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi program di lapangan.

Permasalahan lain yang cukup mencolok adalah kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Meskipun sejumlah program pemberdayaan telah dijalankan, tindak lanjut berupa pendampingan pasca kegiatan masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak program berhenti hanya pada tahap implementasi tanpa menghasilkan dampak jangka panjang yang signifikan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Damarjati, 2023; Hakim & Said, 2024; Septia & Wahyu, 2023; Supriadi, 2021), keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya melalui pelaksanaan program, melainkan memerlukan kesinambungan, konsistensi, serta evaluasi yang adaptif terhadap perubahan kondisi sosial. Ketidadaan sistem monitoring dan pendampingan berkelanjutan menjadi salah satu kelemahan mendasar strategi pemberdayaan di Desa Cambajawaya.

Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala desa idealnya dikembangkan ke arah kepemimpinan kolaboratif dan adaptif. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator dialog, mediator antara pemerintah dan masyarakat, serta pembina potensi lokal. Kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah kepemimpinan yang berbasis pada kearifan lokal, sensitif terhadap dinamika sosial-budaya, serta mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan rasa percaya diri warga untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian, meskipun komitmen kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cambajawaya sudah terlihat melalui berbagai inisiatif, efektivitasnya masih terhambat oleh kelemahan dalam aspek komunikasi, partisipasi, dan keberlanjutan program. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan beberapa langkah strategis:

1. Penguatan kapasitas kepemimpinan agar kepala desa mampu menjalankan peran sebagai pemimpin transformasional, partisipatif, sekaligus kolaboratif.
2. Pembentukan mekanisme evaluasi dan pendampingan berkelanjutan sehingga setiap program memiliki tindak lanjut dan dampak jangka panjang.
3. Penerapan strategi komunikasi yang lebih inklusif untuk memastikan masyarakat benar-benar memahami, merasa memiliki, dan terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan.

Dengan adanya penguatan pada aspek-aspek tersebut, pemberdayaan masyarakat di Desa Cambajawaya berpotensi menghasilkan masyarakat yang lebih mandiri, partisipatif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cambajawaya Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengarahkan, dan mengelola berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan kepala desa tercermin dalam beberapa aspek utama, yaitu perencanaan program yang melibatkan masyarakat, pelaksanaan kegiatan berbasis potensi lokal, transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, serta upaya evaluasi program pemberdayaan.

Meskipun telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, hasil penelitian juga mengungkap adanya sejumlah tantangan. Di antaranya adalah partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif dan terbatas, kurangnya pemahaman warga terhadap tujuan program pemberdayaan, serta belum optimalnya tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat secara menyeluruh.

Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, kepala desa diharapkan dapat memperkuat pendekatan partisipatif yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat, dan membangun sistem pendampingan yang berkelanjutan pasca pelaksanaan program. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala desa dan aparatnya agar mampu memahami dinamika sosial masyarakat dan mendorong keterlibatan warga secara aktif dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, N., & Sasmito, C. (2021). Peranan gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Reformasi*, 11(2), 233–243.
- Bertassini, A. C., Ometto, A. R., Severengiz, S., & Gerolamo, M. C. (2021). Circular economy and sustainability: The role of organizational behaviour in the transition journey. *Business Strategy and the Environment*, 30(7), 3160–3193. <https://doi.org/10.1002/bse.2796>
- Damarjati, R. F. (2023). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Dalam Perspektif Governmentality. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Hakim, R. N., & Said, M. M. ud. (2024). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 18(8), 48–59.
- Handayani, S. (2022). Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Desa. *Sawala*, 2(2), 61–73. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.26221>
- Huberman, A. (2019). Qualitative data analysis a methods sourcebook.
- Kapita, F., Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. (2021). *Panduan umum penggunaan Dana Desa tahun 2021*. Jakarta.
- La Patilaya, H., Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiyati, S., Supriatna, A., Harto, B., ... Hapsari, T. D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat.
- Llorente-Alonso, M., García-Ael, C., & Topa, G. (2024). A meta-analysis of psychological empowerment: Antecedents, organizational outcomes, and moderating variables. *Current Psychology*, 43(2), 1759–1784. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04369-8>
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2020). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Northouse, P. G., & Lee, M. (2025). *Leadership case studies in education*. Sage Publications.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

- Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Saad Alessa, G. (2021). The dimensions of transformational leadership and its organizational effects in public universities in Saudi Arabia: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 12, 682092. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682092>
- Septia, T., & Wahyu, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa melalui KERIS (Keripik Pakis) Tamansatriyan. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/jurnalaksiafirmasi.v4i1.1031>
- Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.
- Suharto, S. (2023). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Peran Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Prosiding Senaspolhi*, 5.
- Supriadi, D. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1).
- Wang, Y. (2021). Artificial intelligence in educational leadership: a symbiotic role of human-artificial intelligence decision-making. *Journal of Educational Administration*, 59(3), 256–270. <https://doi.org/10.1108/JEA-10-2020-0216>
- Zsazsa, C. S. K. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 179–188. <https://doi.org/jipwp.v48i2.2751>